

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Ahmad, dkk., 2012, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. Rev. IV, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddique, Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Asyadie, Zaeni dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Erlangga, Jakarta.
- Atmosudirdjo, Prayudi, 1994, *Hukum Administrasi Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bandung.
- Budimanta, Arief, 2010, *Menuju Pertambangan yang Berkelanjutan di Era Desentralisasi*, Penerbit ITB, Bandung.
- Budiyono, Tri, 2011, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Fuady, Munir, 2010, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over & LBO*, Cetakan IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H.R, Ridwan, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi 1, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hadhikusuma, R.T. Sutantya R. dan Sumantoro, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Edisi 1 Cetakan ke-3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Haris, Freddy dan Teddy Anggoro, 2010, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Ghalia Indonesia, Bogor.

- HS, Salim, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim, Johannes, 2006, *Hukum Organisasi Perusahaan; Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ibrahim, Johnny, 2013, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet. VII, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kansil, C.S.T., dkk., 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas : Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Rineka Cipta.
- Kelsen, Hans, 2008, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Raisul Muttaqien (Penj), Nusa Media, Bandung.
- Khairandy, Ridwan, 2009, *Perseroan Terbatas, Doktrin Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan; Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Kurniawan, Wahyu, 2012, *Corporate Governance; Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung.
- Margono, Sujud, 2008, *Hukum Perusahaan Indonesia (Catatan Atas UU Perseroan Terbatas)*, Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Muchsan, 1981, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1993, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan ke-2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Pramono, Nindyo, 2013, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Prasetyo, Bambang, dkk., 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, PT RajaGrafindo Perkasa, Jakarta.
- Prins, W.F., dan R. Kosim Adisapoetra, 1978, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Purwosutjipto, H. M. N., 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Pengetahuan Dasar Hukum Dagang)*, Cetakan ke-4, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Bentuk-Bentuk Perusahaan)*, Cetakan ke-9, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Ridho, Ali, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Cetakan IV, Alumni, Bandung.
- Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Sastrawidjaja, Man S., dkk., 2012, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, Jld 2, CV Keni Media, Bandung.
- Sembiring, Simon, 2009, *Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah Bagi Anak Bangsa*, Elex Media Kompetindo, Jakarta.
- Silondae, Arus Akbar dan Wirawan B. Ilyas, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sinamo, Nomensen, 2015, *Hukum Administrasi Negara; Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Soehino, 1984, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 15, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tri Budiyo, 2011, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga.

Utrecht, E., 1988, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Wayong, J., dkk., 1983, *Fungsi administrasi Negara*, cet., 4, Djambatan, Jakarta.

Widjaja, Gunawan, 2008, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Forum Sahabat.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2013, *HUKUM : Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang.

#### Karya Ilmiah

Alfiandri, Muhamad Reza, “Tinjauan Yuridis Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Hayati, Tri, “Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah Studi tentang Perizinan Pertambangan Timah di Pulau Bangka”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Indonesia.

#### Internet

Aditiasari, Dana, “Peralihan IUP IMN Salahi UU Minerba”, <http://ekbis.sindonews.com/read/2013/04/19/34/740044/pengalihan-iup-imn-salahi-uu-minerba>, dipost-kan tanggal 19 April 2013, diakses tanggal 25 April 2013.

Al Hasani, Muhsin, “Empat Instrumen Pemerintahan dalam Hukum Administrasi Negara”, [www.administrasipublik.com](http://www.administrasipublik.com), diakses tanggal 25 Maret 2015.

Helmi, “Kedudukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, <http://download.portalgaruda.org>, diakses tanggal 25 Maret 2015.

Mawuntu, J. Ronald, “Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal*, [http://repo.unsrat.ac.id/273/1/KONSEP\\_PENGUASAAN\\_NEGARA\\_BERDASARKAN\\_PASAL\\_33\\_UUD\\_1945\\_DAN\\_PUTUSAN\\_MAHKAMAH\\_KONSTITUSI.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/273/1/KONSEP_PENGUASAAN_NEGARA_BERDASARKAN_PASAL_33_UUD_1945_DAN_PUTUSAN_MAHKAMAH_KONSTITUSI.pdf), diakses tanggal 19 Juli 2015.

“Peralihan IUP Masih Menjadi Polemik”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f4aff756a3d0/pengalihan-iup-masih-menjadi-polemik>, dipost-kan tanggal 27 Februari 2012, diakses tanggal 25 Februari 2013.

Soda, Egenius, “Survei IMI: Ketidakpastian Jadi Hambatan Investasi Sektor Minerba”, [http://www.tambang.co.id/Survey IMI\\_Ketidakpastian Jadi Hambatan Investasi Sektor Minerba \\_ MAJALAH TAMBANG ONLINE.html](http://www.tambang.co.id/Survey_IMI_Ketidakpastian_Jadi_Hambatan_Investasi_Sektor_Minerba_MAJALAH_TAMBANG_ONLINE.html), dipost-kan tanggal 20 April 2015, diakses tanggal 22 April 2015.

Supriyatna, Rimba, “Masih ada Beda Tafsir tentang Aturan Pengalihan IUP”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5139866f7b7af/masih-ada-beda-tafsir-tentang-aturan-pengalihan-iup>, dipost-kan tanggal 08 Maret 2013, diakses tanggal 19 April 2013.

#### Perundang-undangan dan Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham, Serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan mineral dan Batubara.

Putusan Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008-PUU-III/2005 tanggal 19 Juli 2005 tentang Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.